



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis membahas kajian pustaka yang berisi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. Landasan teori berisi konsep-konsep atau teori-teori yang relevan untuk mendukung pembahasan dan analisis penelitian yang relevan dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Landasan teori diambil dari berbagai literatur yang dapat diperoleh dari tulisan di jurnal, skripsi, *thesis* maupun disertasi.

Selanjutnya, penelitian terdahulu yang berisi hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dijalankan. Kemudian kerangka pemikiran yang berisi pola pikir yang menunjukkan hubungan variabel yang akan diteliti, yang diperoleh dari konsep-konsep atau teori-teori maupun penelitian terdahulu yang berupa skema dan uraian singkat. Pada bagian akhir terdapat hipotesis penelitian, yaitu dugaan sementara yang akan dibuktikan dalam penelitian ini.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan merupakan dasar teori yang digunakan dalam praktik bisnis perusahaan. Perspektif *agency theory* merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance*. Menurut Lukviarman (2016:38), *agency theory* memberi fokus terhadap fakta yang berkembang bahwa dalam setiap organisasi individu (*the agent*) akan bertindak sebagai pihak yang dipercaya oleh individu atau sekelompok individu lainnya (*the principal*). Hubungan antara keduanya (*the principal-agent relationships*) akan terjadi dalam organisasi perusahaan antara



sebagai *principal* dengan pengelola (*managers*) sebagai agent dalam hubungan tersebut. Para ahli *agency theory* menggunakan asumsi bahwa kedua pihak tersebut (baik *agent* maupun *principal*) memiliki kepentingan masing-masing (*self interests*) dan kepentingan tersebut lebih banyak mengalami perbedaan dari sudut pandang keduanya (*divergence of interests*). Keinginan yang berbeda tersebut membutuhkan adanya mekanisme yang dapat digunakan *principal* (pemegang saham) untuk senantiasa memonitor *agents* (para manajer). Namun demikian, mekanisme kontrol tersebut adalah sulit untuk dilakukan dan menimbulkan biaya (mahal) karena secara natural pihak manajer (*agents*) umumnya memiliki keahlian yang lebih baik dibanding pemilik (*principals*), serta mekanisme kontrol tersebut tidak dapat dilaksanakan secara terus menerus dan diobservasi secara langsung.

Dalam kaitan ini para ahli *agency theory* berkeyakinan bahwa keberadaan struktur organisasi merupakan upaya yang rasional untuk digunakan, walaupun bersifat kompleks tetapi mampu menciptakan sistem yang efisien di dalam mengatur kerja sama antara kedua pihak yang berhubungan. Lebih lanjut, penganut *agency theory* juga meyakini bahwa struktur organisasi maupun mekanisme kontrol yang dapat digunakan dalam hubungan keagenan tersebut (*the agency relationships*) berbeda antara satu organisasi dengan organisasi lainnya, serta antara satu penugasan dengan penugasan (*task*) lainnya. Skala atau tingkatan perbedaan karakteristik struktur dan mekanisme yang diadopsi oleh setiap organisasi tersebut sangat ditentukan oleh bentuk ketidaksimetrisan informasi (*information asymmetry*) antara *principals* dan *agents*.

Menurut Ujiyantho dan Pramuka (2007) timbulnya manajemen laba dapat dijelaskan dengan teori agensi. Sebagai agen, manajer secara moral bertanggung

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*principal*) dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. Jika kedua belah pihak memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memaksimalkan nilai perusahaan, maka agen akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan *principal*. Pengelola perusahaan yaitu manajer lebih banyak mengetahui kondisi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Ketidakseimbangan penguasaan informasi akan memicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi. Asimetri antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba dalam rangka menyesatkan pemilik (pemegang saham) mengenai kinerja ekonomi perusahaan.

Corporate governance yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan. *Corporate governance* berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana yang telah ditanamkan oleh investor, dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer (Shleifer dan Vishny, 1997). Dengan kata lain *corporate governance* diharapkan dapat berfungsi untuk menekan atau menurunkan biaya keagenan (*agency cost*).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

2. IFRS (*International Financial Reporting Standards*)

a. Pengertian IFRS

Standar akuntansi internasional atau *International Financial Reporting Standards* (IFRS) sebelumnya bernama *International Accounting Standards* (IAS). IAS disusun oleh *International Accounting Standards Committee* (IASC), organisasi pendahulu dari *International Accounting Standards Board* (IASB). IASC didirikan pada Juni 1973. Pada tahun 2001, IASC berganti menjadi IASB. Semua IAS yang telah diterbitkan diadopsi IASB. Standar baru yang diterbitkan oleh IASB diberi nama IFRS. IFRS meliputi semua IAS termasuk juga interpretasi standar yang dikeluarkan oleh *Standing Interpretation Committee* (SIC) dan *International Financial Reporting Interpretation Committee* (IFRIC). Tujuan dari IASB adalah (1) untuk mengembangkan satu set standar akuntansi yang berkualitas tinggi, yang dapat dipahami dan diterapkan secara internasional yang diperlukan sebagai prasyarat dihasilkannya laporan keuangan dan laporan keuangan lain yang berkualitas, transparan, dan dapat dibandingkan untuk membantu pemakai laporan keuangan dan partisipan dari berbagai pasar modal seluruh dunia mengambil keputusan ekonomi, (2) untuk mempromosikan penggunaan standar kepada para pengguna, (3) untuk bekerja sama dengan dewan standar nasional dari berbagai negara untuk melakukan konvergensi dan menjadikan IFRS sebagai standar akuntansi yang berkualitas (Martani *et al.*, 2016).

Menurut Martani *et al.* (2016), IFRS sebagai standar internasional memiliki tiga ciri utama yaitu sebagai berikut:

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(1) *Principle-based*

Standar yang menggunakan *principles-based* hanya mengatur hal-hal yang pokok dalam standar sedangkan prosedur kebijakan detail diserahkan kepada pemakai. Standar mengatur prinsip pengakuan sesuai substansi ekonomi, tidak didasarkan pada ketentuan detail dalam atribut kontrak perjanjian. Sedangkan standar yang *rule based*, memuat ketentuan pengakuan akuntansi secara detail. Keunggulan pendekatan ini akan menghindari dibuatnya perjanjian atau transaksi mengikuti peraturan dalam konsep pengakuan. Penyusunan laporan keuangan dapat merancang suatu transaksi sehingga dapat diakui secara akuntansi dan bukan melihat dari substansi ekonomi dari transaksi tersebut. Namun, standar yang bersifat *principles based* mengharuskan pemakainya untuk membuat penilaian (*judgement*) yang tepat atas suatu transaksi untuk menentukan substansi ekonominya dan menentukan standar yang tepat untuk transaksi tersebut.

(2) Nilai Wajar

Standar akuntansi banyak menggunakan konsep nilai wajar (*fair value*). Penggunaan nilai wajar untuk meningkatkan relevansi informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan. Informasi nilai wajar lebih relevan karena menunjukkan nilai terkini. Hal ini sangat bertolak belakang dengan konsep harga perolehan yang mendasarkan penilaian pada nilai perolehan pertama (*historical cost*). Banyak pengakuan akuntansi saat ini yang dasar penilaiannya masih menggunakan *historical cost*. IFRS membuka peluang penggunaan nilai wajar yang lebih luas dan untuk beberapa item, seperti aset tetap dan aset tak berwujud, dibuka opsi penggunaan nilai wajar selain nilai

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

perolehan. Nilai wajar lebih relevan namun harga perolehan diyakini lebih reliabel.

(3) Pengungkapan

Mengharuskan lebih banyak pengungkapan (*disclosure*) dalam laporan keuangan. Pengungkapan diperlukan agar pengguna laporan keuangan dapat mempertimbangkan informasi yang relevan dan perlu diketahui terkait dengan apa yang dicantumkan dalam laporan keuangan dan kejadian penting yang terkait dengan item tersebut. Pengungkapan dapat berupa kebijakan akuntansi, rincian detail, penjelasan penting, dan komitmen.

b. Konvergensi IFRS di Indonesia

Menurut Wijanarko dan Tjahjono (2016), lembaga profesi akuntansi IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) menetapkan bahwa Indonesia melakukan konvergensi penuh (*full convergence*) IFRS pada 1 Januari 2012. Penerapan ini bertujuan agar daya informasi laporan keuangan dapat terus meningkat sehingga laporan keuangan dapat semakin mudah dipahami dan dapat dengan mudah digunakan baik bagi penyusun, auditor, maupun pembaca atau pengguna lain.

Dalam melakukan konvergensi IFRS, terdapat dua macam strategi adopsi, yaitu *big bang strategy* dan *gradual strategy*. *Big bang strategy* mengadopsi penuh IFRS sekaligus, tanpa melalui tahapan-tahapan tertentu. Strategi ini digunakan oleh negara-negara maju. Sedangkan pada *gradual strategy*, adopsi IFRS dilakukan secara bertahap. Strategi ini digunakan oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia. Terdapat tiga tahapan dalam melakukan konvergensi IFRS di Indonesia, yaitu:



- (1) Tahap Adopsi (2008-2011), meliputi aktivitas dimana seluruh IFRS diadopsi ke PSAK, persiapan infrastruktur yang diperlukan, dan evaluasi terhadap PSAK yang berlaku.
- (2) Tahap Persiapan Akhir (2011), dalam tahap ini dilakukan penyelesaian terhadap persiapan infrastruktur yang diperlukan. Selanjutnya, dilakukan penerapan secara bertahap beberapa PSAK berbasis IFRS.
- (3) Tahap Implementasi (2012), berhubungan dengan aktivitas penerapan PSAK IFRS secara bertahap. Kemudian dilakukan evaluasi terhadap dampak penerapan PSAK secara komprehensif.

c. Dampak Implementasi IFRS

Wijanarko dan Tjahjono (2016) mengungkapkan bahwa implementasi IFRS dapat memberikan dampak positif dan negatif dalam dunia bisnis dan jasa audit di Indonesia. Berikut ini adalah berbagai dampak dalam penerapan IFRS:

- (1) Akses ke pendanaan internasional akan lebih terbuka karena laporan keuangan akan lebih mudah dikomunikasikan ke investor global.
- (2) Relevansi laporan keuangan akan meningkat karena lebih banyak menggunakan nilai wajar.
- (3) Kinerja keuangan (laporan laba rugi) akan fluktuatif apabila harga-harga fluktuatif.
- (4) *Income Smoothing* menjadi semakin sulit dengan penggunaan *balance sheet approach* dan *fair value*.
- (5) *Principle-based standards* mungkin menyebabkan keterbandingan laporan keuangan sedikit menurun yakni bila penggunaan *professional judgement* ditumpangi dengan kepentingan untuk mengatur laba (*earning management*).



(6) Penggunaan *off balance sheet* semakin terbatas.

Dari beberapa dampak implementasi penggunaan IFRS tersebut, terdapat poin yang menyebutkan bahwa *income smoothing* menjadi semakin sulit untuk dilakukan dengan penggunaan *balance sheet approach* dan *fair value*. Kemudian dari beberapa poin tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi IFRS dapat meningkatkan daya informasi dari pelaporan keuangan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Adopsi standar internasional ini juga sangat penting dalam rangka stabilitas perekonomian. IFRS diharapkan akan mengurangi hambatan-hambatan investasi, meningkatkan transparansi perusahaan, mengurangi biaya yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan, dan mengurangi *cost of capital*.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Manajemen Laba

a. Definisi Manajemen Laba

Menurut Scott (2015:445) mendefinisikan manajemen laba sebagai:

“Earnings management is the choice by a manager of accounting policies, or real actions, affecting earnings so as to achieve some specific reported earnings objective.”

Menurut Sulistyanto (2014:6) manajemen laba didefinisikan sebagai:

“Manajemen laba merupakan upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan.”

Berdasarkan teori-teori diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen laba adalah perilaku atau tindakan manajer untuk meningkatkan dan mengurangi laba dengan memainkan angka-angka dalam laporan keuangan sesuai tujuan yang ingin dicapainya. Scott (2015:445) memandang manajemen laba melalui dua sudut pandang. Pertama, manajemen laba dipandang sebagai perilaku *opportunistic*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

manajer untuk memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak hutang, dan *political cost* (*Opportunistic Earning Management*). Kedua, manajemen laba dipandang dari perspektif *efficient contracting* (*Efficient Earning Management*). Perspektif ini menggambarkan bahwa manajemen laba memberikan kepada manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak.

Pengukuran manajemen laba menurut Dechow *et al.* (1995) dilakukan dengan menggunakan *proxy discretionary accrual* (DACC) yang dihitung dengan menyelisihkan *total accrual* (TA) dan *non discretionary accruals* (NDA). Dalam menghitung DACC menggunakan *Modified Jones Model*. Dalam mengukur manajemen laba yang menggunakan *Modified Jones Model* dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

- (1) Menghitung *total accrual* dengan persamaan:

$$TACC_{it} = N_{it} - CFO_{it}$$

- (2) Menghitung nilai *accrual* dengan persamaan regresi linear sederhana atau *Ordinary Least Square* (OLS) dengan persamaan:

$$\frac{TACC_{it}}{TA_{it-1}} = \alpha_1 \left(\frac{1}{TA_{it-1}} \right) + \alpha_2 \left(\frac{\Delta REV_{it}}{TA_{it-1}} \right) + \alpha_3 \left(\frac{PPE_{it}}{TA_{it-1}} \right) + e$$

- (3) Dengan menggunakan koefisien regresi diatas, nilai *non discretionary accrual* (NDA) dapat dihitung dengan rumus:

$$NDACC_{it} = \alpha_1 \left(\frac{1}{TA_{it-1}} \right) + \alpha_2 \left(\frac{\Delta REV_{it}}{TA_{it-1}} - \frac{\Delta REC_{it}}{TA_{it-1}} \right) + \alpha_3 \left(\frac{PPE_{it}}{TA_{it-1}} \right)$$

- (4) Menghitung nilai *discretionary accrual* dengan persamaan:

$$DACC_{it} = \frac{TACC_{it}}{TA_{it-1}} - NDACC_{it}$$



Keterangan:

$DACC_{it}$	= <i>Discretionary Accruals</i> perusahaan i pada periode ke t
$NDACC_{it}$	= <i>Non Discretionary Accruals</i> perusahaan i pada periode ke t
$TACC_{it}$	= Total AkruaI perusahaan i pada periode ke t
N_{it}	= Laba bersih perusahaan i pada periode ke t
CFO_{it}	= Aliran kas dari aktivitas operasi perusahaan i pada periode ke t
TA_{it-1}	= Total aktiva perusahaan i pada periode ke t-1
ΔREV_{it}	= Perubahan pendapatan perusahaan i pada periode ke t
PPE_{it}	= Aktiva tetap perusahaan pada periode ke t
ΔREC_{it}	= Perubahan piutang perusahaan i pada periode ke t
e	= <i>error</i>

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

b. Pola-pola Manajemen Laba

Pola-pola manajemen laba yang dilakukan manajer menurut Scott (2015:447), sebagai berikut:

(1) *Taking a bath* (Kepalang Basah)

Teknik ini dilakukan dengan cara menghapus aset dari laporan keuangan pada periode berjalan sehingga jumlah biaya akan berkurang untuk periode di masa yang akan datang. Penghapusan aset ini akan berakibat pada rendahnya laba pada periode penghapusan tersebut. Oleh karena itu, teknik ini umumnya dilakukan pada saat perusahaan mengalami tahun buruk (kerugian) yang tidak bisa dihindari. Manajemen memutuskan untuk sekalian “kepalang basah” untuk menghapus aset pada periode tersebut untuk meningkatkan laba di masa depan. Manajemen juga melakukan teknik ini saat



laba bersih perusahaan berada di bawah atas untuk mendapatkan bonus agar bisa mendapatkan bonus yang lebih besar di periode yang akan datang.

(2) *Income minimization* (Minimalisasi Laba)

Teknik ini mirip dengan teknik *taking a bath*, tetapi tidak perlu ekstrim. Teknik ini umumnya dilakukan pada saat perusahaan mendapatkan sorotan dari publik karena memiliki profitabilitas yang tinggi atau untuk menghindari beban pajak. Teknik ini dilakukan dengan cara menghapus aktiva modal dan aktiva tak berwujud perusahaan, mengakui beban penelitian dan pengembangan, dan sebagainya.

(3) *Income maximization* (Maksimalisasi Laba)

Berlawanan dengan *income minimalization*, *income maximization* dilakukan dengan cara mengakui pendapatan yang sewajarnya diakui di masa yang akan datang dan cenderung menunda pembebanan yang seharusnya terjadi pada masa sekarang. Manajemen umumnya melakukan maksimalisasi laba dengan tujuan untuk mendapatkan bonus atau sudah mendekati pelanggaran perjanjian hutang.

(4) *Income smoothing* (Perataan Laba)

Income smoothing merupakan teknik manajemen laba yang paling sering dilakukan. Teknik ini dilakukan dengan cara manajemen menaikkan atau menurunkan laba untuk menghindari fluktuasi yang terlalu tajam dalam laba yang dilaporkan perusahaan. Pada umumnya, manajer melakukan perataan laba untuk: (a) mendapatkan bonus yang pasti; (b) mengurangi ketidakstabilan laba yang dilaporkan agar tidak muncul pelanggaran perjanjian hutang; (c) mengurangi kemungkinan manajer dipecat; dan (d)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

menarik perhatian investor untuk melakukan investasi pada perusahaan tersebut.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

c. Motivasi Manajemen Laba

Menurut Scott (2015:448) beberapa motivasi yang mendorong manajemen melakukan manajemen laba antara lain sebagai berikut:

(1) Bonus Scheme

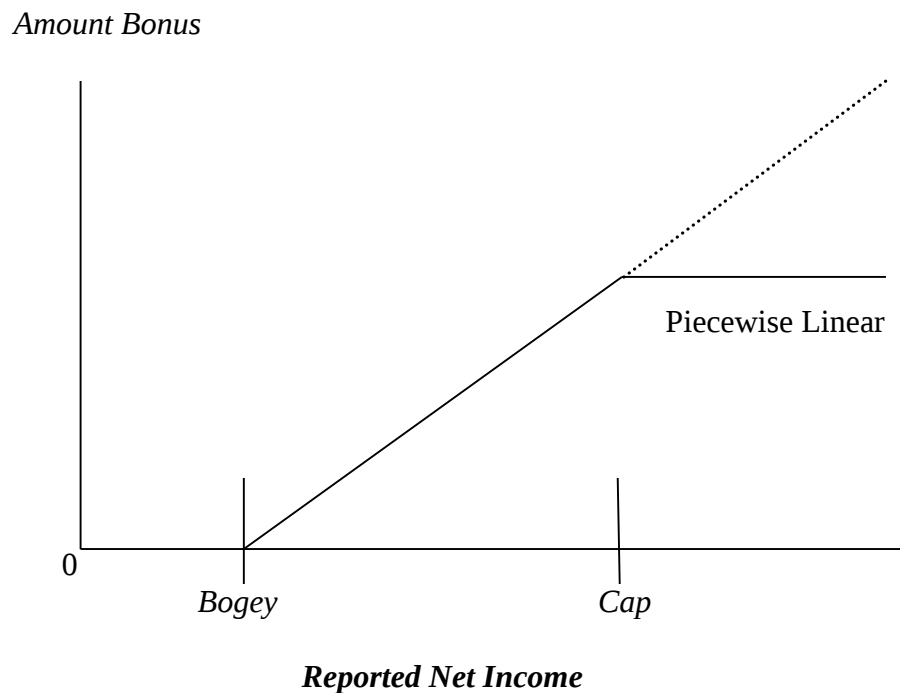
Manajer memiliki informasi mengenai laba perusahaan sebelum melakukan manajemen laba. Manajer akan berusaha mengatur laba bersih agar dapat memaksimalkan bonusnya. Dalam kontrak bonus dikenal dua istilah, yaitu *bogey* dan *cap*. *Bogey* merupakan batas bawah untuk mendapatkan bonus. Jika laba berada dibawah *bogey*, maka manajer tidak mendapat bonus sama sekali. Sedangkan jika laba berada di atas *cap*, maka manajer tidak akan mendapat bonus tambahan. Jika laba bersih berada di bawah *bogey*, maka manajer akan cenderung memperkecil laba dengan cara banyak membebankan beban pada periode ini sehingga akan mengurangi beban di periode berikutnya. Dengan melakukan hal ini, maka laba periode berikutnya akan meningkat sehingga manajer dapat memperoleh bonus yang lebih besar pada periode berikutnya. Jika laba berada di atas *cap*, maka manajer tidak akan mendapatkan bonus lebih dari yang telah ditentukan pada titik *cap*. Jadi pihak manajemen akan melakukan manajemen laba untuk mendapatkan bonus sebesar-besarnya. Skema bonus *bogey* dan *cap* dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Gambar 2.1

Typical Bonus Scheme



Sumber :Financial Accounting Theory (Scott,2015;448)

(2) Motivasi Kontrak Lain (*Other Contractual Motivation*)

Kontrak hutang muncul dari moral hazard yang terjadi antara manajer dengan pemberi pinjaman, biasanya bergantung pada variabel-variabel akuntansi. Untuk mengatasi masalah ini, kontak hutang jangka panjang selalu dibuat perjanjian agar mencegah manajer bertindak berlawanan dengan kepentingan pemberi pinjaman, seperti membagi dividen yang berlebihan, menambah pinjaman atau membiarkan modal kerja perusahaan turun sampai kepada tingkat tertentu. Pelaksanaan manajemen laba dari kepentingan perjanjian kontrak ini sejalan dengan *debt covenant hypothesis* pada teori akuntansi positif. Jadi motivasi kontrak ini berkaitan dengan hutang jangka panjang yaitu dengan cara menaikkan laba bersih untuk mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami *technical default*.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

(3) Untuk Memenuhi Laba yang diharapkan Investor dan Memelihara Reputasi
(*To Meet Investor's Earning Expectations and Maintain Reputation*)

Perusahaan melaporkan laba yang besar dari yang diharapkan investor dapat menikmati kenaikan harga saham perusahaan secara signifikan sehingga investor menganggap adanya kemungkinan kinerja yang baik di masa depan. Sebaliknya, perusahaan yang tidak dapat memenuhi harapan investor akan mengalami penurunan harga saham yang signifikan. Jika tidak dapat mencapai laba yang diharapkan investor, maka pasar menilai manajer perusahaan tidak mampu mengelola perusahaan dengan baik. Oleh karena itu, manajer terdorong untuk melakukan manajemen laba untuk memastikan bahwa laba telah sesuai dengan harapan investor, terutama jika manajer dijanjikan untuk mendapatkan jumlah bonus sebagai imbalannya.

(4) Penawaran Saham Perdana (*Initial Public Offerings*)

Manajer perusahaan yang *go public* melakukan manajemen laba untuk memperoleh harga yang lebih tinggi atas saham dengan harapan mendapatkan respon pasar yang positif terhadap peramalan laba sebagai sinyal dari nilai perusahaan. Untuk menarik perhatian para investor, perusahaan akan memaksimalkan laba perusahaan dan melakukan perataan laba.

Watts dan Zimmerman (1990) juga mengungkapkan tiga motivasi manajemen dalam melakukan manajemen laba, yaitu:

(1) *Bonus Plan Hypothesis*

Hipotesis bonus plan adalah manajer perusahaan yang menggunakan metode bonus plan biasanya akan cenderung untuk menggunakan metode akuntansi yang akan meningkatkan laba saat ini untuk mendapatkan



bonus atas hasil kerja yang sudah dilakukannya, akibat dari motivasi yang diberikan oleh perusahaan pada manajer yang menghasilkan keuntungan yang besar akan mendapatkan bonus/kompensasi.

(2) *Debt or Equity Hypothesis*

Pada perusahaan yang mempunyai rasio *debt or equity* besar, maka manajer perusahaan tersebut cenderung menggunakan metode akuntansi yang akan meningkatkan pendapatan atau laba agar kewajiban hutangnya yang seharusnya diselesaikan pada tahun tertentu dapat ditunda pada tahun berikutnya. Upaya ini dilakukan agar perusahaan bisa menggunakan dana tersebut untuk keperluan lain. Pada umumnya, pihak kreditor akan melakukan kontrak perjanjian dengan manajer dan menekankan pada batas rasio *debt or equity* nya, karena itu menunjukkan kemampuan manajer dalam membayar utang.

(3) *Political Cost Hypothesis*

Pada perusahaan besar yang kegiatan operasinya menyentuh sebagian besar masyarakat akan cenderung untuk mengurangi laba yang dilaporkan, agar pajak yang dibayarkan ke pemerintah menjadi kecil dan tidak menarik perhatian pemerintah serta masyarakat.

4. Corporate Governance

a. Definisi *Corporate Governance*

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2001) mendefinisikan *corporate governance* sebagai suatu perangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Good corporate governance dipandang sebagai upaya pengendalian yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kinerja manajemen dengan melakukan pengendalian yang lebih diarahkan pada pengawasan perilaku manajer, sehingga tindakan yang dilakukan oleh manajer dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) menyusun suatu pedoman yang dijadikan acuan dalam penerapan *corporate governance*.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

b. Asas Corporate Governance

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance*, terdapat lima asas *corporate governance* dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* (2006), yaitu:

(1) Transparansi (*Transparency*)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan-peraturan undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

(2) Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

(3) Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundangan-undangan, serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

(4) Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas *Good Corporate Governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

(5) Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pihak yang berkepentingan berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Berbagai penelitian terkait *corporate governance* menghasilkan berbagai mekanisme yang meyakinkan *stakeholder* bahwa tindakan manajemen laba selaras dengan kepentingan mereka. Mekanisme *corporate governance* dibagi menjadi dua bagian yaitu mekanisme *internal governance* seperti proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kualitas audit, kompensasi eksekutif dan mekanisme *eksternal governance* seperti pengendalian oleh pasar dan level *debt financing* (Barnhart dan Rosenstein, 1998).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5. Proporsi Dewan Komisaris Independen

C Dewan komisaris sebagai organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance*. Sementara itu, komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi. Yang dimaksud dengan terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006).

Jumlah komisaris independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu dari komisaris independen harus mempunyai latar belakang akuntansi atau keuangan. Penelitian Prastiti dan Meiranto (2013) mengungkapkan bahwa semakin banyak jumlah komisaris independen dalam perusahaan, maka tindakan pengawasan semakin meningkat dan dapat mengurangi manajemen laba yang terjadi.

Keberadaan komisaris independen diatur dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa, dijelaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), salah satu syarat yang wajib dimiliki oleh Perusahaan Tercatat adalah memiliki komisaris independen yang jumlahnya secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan Pemegang Saham Pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Menurut peraturan BEJ Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 persyaratan menjadi

komisaris independen pada Perusahaan Tercatat adalah sebagai berikut:

- a. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Tercatat yang bersangkutan;
- b. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan direktur dan/atau komisaris lainnya Perusahaan Tercatat yang bersangkutan;
- c. Tidak bekerja rangkap sebagai direktur di perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan Perusahaan Tercatat yang bersangkutan;
- d. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

6. Jumlah Rapat Dewan Komisaris

Dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006) mengungkapkan bahwa setiap perusahaan harus membuat pernyataan tentang kesesuaian penerapan GCG dengan Pedoman GCG ini dalam laporan tahunannya.

Pernyataan tersebut harus disertai laporan tentang struktur dan mekanisme kerja organ perusahaan serta informasi penting lain yang berkaitan dengan penerapan GCG. Dengan demikian, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk regulator, dapat menilai sejauh mana Pedoman GCG pada perusahaan tersebut telah diterapkan.

Laporan tentang struktur dan mekanisme kerja organ perusahaan meliputi struktur dan mekanisme kerja dewan komisaris, yang antara lain mencakup:

- a. Nama anggota dewan komisaris dengan menyebutkan statusnya yaitu komisaris independen atau komisaris bukan independen;



- b. Jumlah rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris, serta jumlah kehadiran setiap anggota dewan komisaris dalam rapat;
- c. Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri (*self assessment*) tentang kinerja masing-masing para anggota dewan komisaris;
- d. Penjelasan mengenai komite-komite penunjang dewan komisaris yang meliputi:
 - (i) nama anggota dari masing-masing komite; (ii) uraian mengenai fungsi dan mekanisme kerja dari setiap komite; (iii) jumlah rapat yang dilakukan oleh setiap komite serta jumlah kehadiran setiap anggota; dan (iv) mekanisme dan kriteria penilaian kinerja komite.

Menurut peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor Per-01/MBU/2011 pasal 14 dijelaskan bahwa rapat dewan komisaris harus diadakan secara berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan, dan dalam rapat tersebut dewan komisaris dapat mengundang direksi. Besarnya intensitas pertemuan yang diadakan oleh dewan komisaris diharapkan akan mampu meningkatkan kepatuhan pengungkapan wajib IFRS.

7. Proporsi Komite Audit Independen

Menurut Sulistyanto (2014:141), komite audit bertugas melakukan pengawasan untuk meningkatkan efektivitas dalam menciptakan keterbukaan dan pelaporan keuangan yang berkualitas, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pengawasan internal yang memadai. Sedangkan menurut Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia yang dikeluarkan oleh KNKG (2006), tugas komite audit membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa: (i) laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, (ii) struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



baik, (iii) pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan (iv) tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: Kep-643/BL/2012 dalam peraturan nomor IX.1.5, menjelaskan bahwa komite audit dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Menurut peraturan tersebut, struktur dan keanggotaan komite audit adalah sebagai berikut:

- a. Komite audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik.
- b. Komite audit diketuai oleh komisaris independen.
- c. Komisaris independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - (1) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - (2) Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik tersebut;
 - (3) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik tersebut; dan
 - (4) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



8. Proporsi Komite Audit yang Memiliki Keahlian Akuntansi atau Keuangan

Menurut Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: Kep-643/BL/2012 dalam peraturan nomor IX.1.5 menjelaskan bahwa persyaratan keanggotaan komite audit antara lain:

- a. wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- b. wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- c. wajib mematuhi kode etik komite audit yang ditetapkan oleh emiten atau perusahaan publik;
- d. bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
- e. wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan;
- f. bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, kantor jasa penilai publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- g. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali komisaris independen;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- h. tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik;
 - i. dalam hal anggota komite audit memperoleh saham emiten atau perusahaan publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
 - j. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik tersebut; dan
 - k. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik tersebut.
- Dengan demikian diharapkan semakin banyak anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan maupun keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan dapat mengurangi praktik manajemen laba yang terjadi.

9. Kualitas Auditor

Reputasi auditor sangat menentukan kredibilitas laporan keuangan. Independensi dan kualitas sumber akan berdampak terhadap pendeteksian manajemen laba (Andini dan Sulistyanto, 2011). Hasil audit tidak bisa diamati secara langsung sehingga pengukuran variabel kualitas audit maupun kualitas auditor menjadi sulit untuk dioperasionalkan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, para peneliti terdahulu mencari pengganti dari indikator kualitas audit. Proksi yang sering dipakai untuk indikator dari kualitas audit adalah ukuran kantor akuntan publik (Effendi dan Daljono, 2013).

Becker *et al.* (1998) menyatakan bahwa klien dari auditor *Non Big 6* melaporkan *discretionary accrual* yang lebih tinggi dari yang dilaporkan oleh klien auditor *Big*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



6. Dapat disimpulkan bahwa klien dari auditor *Non Big 6* cenderung lebih tinggi dalam melakukan *earnings management*. Karena pada saat penelitian ini KAP *Big 6* telah berubah menjadi *Big 4*, maka diduga bahwa klien dari KAP *Non Big 4* cenderung lebih tinggi dalam melakukan *earnings management* dibandingkan dengan klien dari KAP *Big 4*. Kualitas audit dalam penelitian ini diukur dengan KAP *Big 4* dan KAP *Non Big 4*. Berikut ini adalah nama-nama KAP yang termasuk dalam jajaran KAP *Big 4*:

- KAP Haryanto Sahari & rekan yang berafiliasi dengan *Price Waterhouse Coopers* (PWC).
- KAP Purwanto, Sarwoko, & Sandjaja yang berafiliasi dengan *Ernst & Young* (EY).
- KAP Osman Bing Satrio & rekan yang berafiliasi dengan *Delloitte Touche Tohmatsu* (DTT).
- KAP Siddharta & Widjaja yang berafiliasi dengan *Klynveld Peat Marwick Goerdeler* (KPMG).

10. Pertumbuhan Perusahaan (*Growth*)

Growth atau pertumbuhan perusahaan merupakan kemampuan perusahaan untuk meningkatkan *size* atau ukuran perusahaan. Untuk dapat tumbuh secara konstan dalam jangka waktu yang panjang, perusahaan harus menyediakan modal yang cukup untuk membiayai kegiatan operasional dan non operasional perusahaan dalam rangka keperluan ekspansi. Pertumbuhan perusahaan yang cepat maka akan semakin besar dana yang dibutuhkan untuk ekspansi. Semakin tinggi kebutuhan modal perusahaan di masa datang, maka semakin tinggi pula keinginan perusahaan untuk menahan laba. Tuntutan terhadap kebutuhan modal dan kebutuhan pembiayaan yang



besar di masa mendatang, maka dimungkinkan akan mendorong perusahaan untuk melakukan manajemen laba (Wijanarko dan Tjahjono, 2016). *Growth* diproksikan dengan nilai PBV (*Price Book Value*) perusahaan yaitu perbandingan nilai pasar ekuitas perusahaan dengan nilai bukunya. Variabel *growth* yang diproksikan dengan PBV menunjukkan kesempatan bertumbuh (*growth opportunity*) dari perusahaan tersebut. Semakin tinggi nilai pasar daripada nilai bukunya maka semakin baik kesempatan perusahaan tersebut untuk bertumbuh dan begitu juga sebaliknya (Wardhani dan Joseph, 2010).

$$PBV = \frac{\text{Nilai Pasar Ekuitas}}{\text{Nilai Buku Ekuitas}}$$

11. Leverage

Salah satu alternatif sumber dana perusahaan selain menjual saham di pasar modal adalah melalui sumber dana eksternal berupa hutang. Perusahaan akan berusaha memenuhi perjanjian hutang agar memperoleh penilaian yang baik dari kreditur. Hal ini kemudian dapat memotivasi manajer melakukan manajemen laba untuk menghindari pelanggaran perjanjian hutang (Jao dan Pagalung, 2011). Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi berarti memiliki liabilitas yang lebih besar jika dibandingkan dengan aset yang dimiliki, hal ini akan mengakibatkan risiko dan tekanan yang besar pada perusahaan. Tekanan ini akan mendorong manajemen melakukan manajemen laba. *Leverage* diukur menggunakan *Debt to Asset Ratio*, yaitu total kewajiban dibagi dengan total aset (Purwanti dan Rahardjo, 2012).

$$DAR = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Aset}}$$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



12. Ukuran Perusahaan (*Size*)

Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar atau kecilnya suatu perusahaan. Perusahaan besar memiliki jumlah aset yang lebih besar, sehingga perusahaan dapat melakukan proses penjualan lebih banyak, selain itu perusahaan memiliki jumlah modal yang ditanam lebih banyak sehingga mengakibatkan lebih banyak pihak yang terlibat dalam perusahaan, sehingga perusahaan akan lebih berhati-hati dalam menyampaikan kondisi laporan keuangannya. *Size* mempunyai pengaruh negatif secara signifikan terhadap manajemen laba. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin kecil tindakan manajemen laba yang dilakukan (Purwanti dan Rahardjo, 2012). Ukuran perusahaan diukur menggunakan logaritma natural dari total aset (Jao dan Pagalung, 2011).

$$SIZE = \text{Logaritma natural of total assets}$$

13. Profitabilitas (*Profitability*)

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba.

Profitabilitas adalah tingkat keuntungan bersih yang berhasil diperoleh perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. Profitabilitas dapat mempengaruhi manajer untuk melakukan manajemen laba. Karena jika profitabilitas yang di dapat perusahaan rendah, maka manajer akan melakukan tindakan manajemen laba untuk menyelamatkan kinerjanya dimata pemilik. Hal ini berkaitan erat dengan usaha manajer untuk menampilkan performa terbaik dari perusahaan yang dipimpinnya (Gunawan *et al.* 2015). Profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan skala rasio *Return on Assets* (ROA) yaitu perbandingan antara laba bersih setelah pajak terhadap total aset (Guna dan Herawaty, 2010).

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$



B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Deni Wijanarko dan Achmad Tjahjono (2016)	Pengaruh Adopsi IFRS Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2014	Independen: IFRS Dependen: Manajemen Laba	Adopsi IFRS berpengaruh terhadap manajemen laba
2	Anggun Putri Pratiwi dan Monica Weni Pratiwi (2016)	Pengaruh Adopsi IFRS Terhadap Manajemen Laba di Indonesia	Independen: IFRS Dependen: Manajemen Laba	Adopsi IFRS tidak berpengaruh terhadap manajemen laba
3	Hasna Katsurayya dan Ledian Sufiana (2016)	Pengaruh Konvergensi IFRS Terhadap Manajemen Laba dengan Mekanisme <i>Corporate Governance</i> Sebagai Variabel Moderating Pada Perusahaan Sektor <i>Property</i> dan <i>Real Estate</i> yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014	Independen: Konvergensi IFRS Dependen: 1. Manajemen Laba Akrua 2. Manajemen Laba Riil Moderasi: 1. Proporsi Dewan Komisaris Independen 2. Ukuran Dewan Komisaris 3. Komite Audit Independen	Konvergensi IFRS tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba akrual Proporsi Dewan Komisaris Independen, Ukuran Dewan Komisaris, Komite Audit Independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial tidak memoderasi pengaruh konvergensi IFRS

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Penelitian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.			4. Kualitas Auditor 5. Kepemilikan Institusional 6. Kepemilikan Manajerial Kontrol: 1. <i>Leverage</i> 2. <i>Growth</i> 3. <i>Size</i> 4. <i>Profitability</i>	terhadap manajemen laba akrual Kualitas Auditor memoderasi konvergensi IFRS terhadap manajemen laba akrual Konvergensi IFRS berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba riil Proporsi Dewan Komisaris Independen, Ukuran Dewan Komisaris, Komite Audit Independen, Kepemilikan Manajerial tidak memoderasi pengaruh konvergensi IFRS terhadap manajemen laba riil Kepemilikan Institusional memoderasi pengaruh konvergensi IFRS terhadap manajemen laba riil
---	--	--	--	---



4	Mukhlisur Ridlo dan Kurnia (2016) Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Pengaruh Kualitas Auditor dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap Manajemen Laba	Independen: 1. Kualitas Auditor 2. Kepemilikan Manajerial 3. Kepemilikan Institusional 4. Proporsi Dewan Komisaris Independen Dependen: Manajemen Laba	Kualitas Auditor berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba Kepemilikan Manajerial dan Proporsi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba
5	Erna Widiastuty (2016) Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie	Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Manajemen Laba	Independen: 1. Independensi Komite Audit 2. Ukuran Komite Audit 3. Ahli Finansial (<i>Finacial Expertise</i>) 4. Jumlah Pertemuan Komite Audit Dependen: Manajemen Laba	Independensi Komite Audit, Ukuran Komite Audit, dan Jumlah Pertemuan Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba <i>Financial Expertise</i> berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



6	Anindyah Prastiti dan Wahyu Meiranto (2013) Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris dan Komite Audit Terhadap Manajemen Laba	Independen: 1. Ukuran Dewan Komisaris 2. Independensi Dewan Komisaris 3. Keahlian Keuangan Dewan Komisaris 4. Frekuensi Pertemuan Dewan Komisaris 5. Ukuran Komite Audit 6. Independensi Komite Audit 7. Keahlian Keuangan Komite Audit 8. Frekuensi Pertemuan Komite Audit Dependen: Manajemen Laba	Ukuran Dewan Komisaris, Independensi Dewan Komisaris, dan Independensi Komite Audit berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba Keahlian Keuangan Dewan Komisaris, Frekuensi Pertemuan Dewan Komisaris, Ukuran Komite Audit, Keahlian Keuangan Komite Audit, dan Frekuensi Pertemuan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba
7	Ratu Nurul Qomariah dan Marsono (2013)	Dampak Konvergensi IFRS Terhadap Manajemen Laba Dengan Struktur Kepemilikan Manajerial Sebagai Variabel Moderating	Independen: 1. Konvergensi IFRS 2. Struktur Kepemilikan Manajerial Dependen: Manajemen Laba	Konvergensi IFRS berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba Kepemilikan Saham Manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



8 Sofyan Effendi dan Daljono (2013) Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> dan Kualitas Auditor Terhadap Manajemen Laba	Independen: 1. Ukuran Perusahaan 2. Komposisi Dewan Komisaris 3. Ukuran Komite Audit 4. Aktivitas Komite Audit 5. Kepemilikan Saham Institusional 6. Kepemilikan Saham Manajerial 7. Kualitas Auditor Dependen: Manajemen Laba	Ukuran Komite Audit dan Kualitas Auditor berpengaruh negatif yang signifikan terhadap manajemen laba Kepemilikan Saham Manajerial berpengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba Ukuran Perusahaan, Proporsi Komisaris Independen, Aktivitas Komite Audit, dan Kepemilikan Saham Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba
9 Prima Santy, Tawakkal, dan Grace T. Pontoh (2012)	Pengaruh Adopsi IFRS Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Perbankan di Bursa Efek Indonesia	Independen: IFRS Dependen: Manajemen Laba Kontrol: 1. Ukuran Perusahaan (<i>Size</i>) 2. <i>Financial Leverage</i> (D/E)	Adopsi IFRS tidak berpengaruh terhadap manajemen laba Size dan Financial Leverage berpengaruh positif terhadap manajemen laba Market to Book Ratio berpengaruh negatif



			3. <i>Market to Book Ratio</i> (M/B) 4. <i>Institutional Investors</i> (II)	terhadap manajemen laba Institutional Investors tidak berpengaruh terhadap manajemen laba
10	© Hak cipta milik IBI KGS (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Hak Cipta dilindungi Undang-Undang Rahayu Budhi Purwanti dan Shiddiq Nur Rahardjo (2012)	Pengaruh Kecakapan Manajerial, Kualitas Auditor, Komite Audit, <i>Firm Size</i> dan <i>Leverage</i> Terhadap Manajemen Laba	Independen: 1. Kecakapan Manajerial 2. Kualitas Auditor 3. Komite Audit 4. Ukuran Perusahaan 5. <i>Leverage</i> Dependen: Manajemen Laba	Kecakapan Manajerial berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap manajemen laba Kualitas Auditor berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba Komite Audit dan Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba <i>Leverage</i> berpengaruh positif tidak signifikan terhadap manajemen laba
11	Robert Jao dan Gagaring Pagalung (2011)	<i>Corporate Governance</i>, Ukuran Perusahaan, dan <i>Leverage</i> Terhadap Manajemen Laba	Independen: 1. Kepemilikan Manajerial 2. Kepemilikan Institusional	Kepemilikan Manajerial, Komposisi Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Ukuran

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.	© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Perusahaan Manufaktur Indonesia	3. Ukuran Dewan Komisaris 4. Komposisi Dewan Komisaris Independen 5. Komite Audit 6. Ukuran Perusahaan 7. <i>Leverage</i> Dependen: Manajemen Laba	Perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba Kepemilikan Institusional dan Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba <i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba
		Analisis Pengaruh Mekanisme <i>Corporate Governance</i> Terhadap Manajemen Laba	Independen: 1. Proporsi Dewan Komisaris Independen 2. Proporsi Komite Audit 3. Kepemilikan Managerial 4. Kepemilikan Institusional 5. Kualitas Auditor Dependen: Manajemen Laba	Komite Audit, Kepemilikan Institusional, dan Kualitas Auditor tidak berpengaruh terhadap manajemen laba Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba Kepemilikan Managerial berpengaruh positif signifikan



				terhadap manajemen laba
13.	Wellyn I Guna dan Arleen Herawaty (2010)	Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> , Independensi Auditor, Kualitas Audit dan Faktor Lainnya Terhadap Manajemen Laba	Independen: 1. Kepemilikan Institusional 2. Kepemilikan Manajemen 3. Komite Audit 4. Independensi Auditor 5. Komisaris Independen 6. Independensi Auditor 7. <i>Leverage</i> 8. Kualitas Audit 9. Profitabilitas 10. Ukuran Perusahaan Dependen: Manajemen Laba	Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajemen, Komite Audit, Komisaris Independen, Independensi Auditor, dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba <i>Leverage</i>, Kualitas Audit, dan Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba
14.	Muli Arief Ujianto dan Bambang Agus Prambuka (2007)	Mekanisme <i>Corporate Governance</i> , Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan	Independen: 1. Kepemilikan Institusional 2. Kepemilikan Manajerial 3. Proporsi Dewan Komisaris Independen 4. Ukuran Dewan Komisaris Dependen:	Kepemilikan Institusional, Jumlah Dewan Komisaris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.	© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Hak Cipta Dilindungi Undang-undang		1. Manajemen Laba 2. Kinerja Keuangan	Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba Manajemen laba tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan
		Biao Xie, Wallace N. Davidson III, dan Peter J. Dalt (2003) <i>Earnings Management and Corporate Governance The Role of The Board and The Audit Committee</i>	Independen: 1. Pertemuan Dewan Direksi 2. Pertemuan Komite Audit 3. Latar Belakang Keuangan Dewan Direksi 4. Latar Belakang Keuangan Komite Audit Dependen: Manajemen Laba	Frekuensi Pertemuan Dewan Direksi dan Komite Audit berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba Latar Belakang Keuangan Dewan Direksi dan Komite Audit berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba

C. Kerangka Pemikiran

1. Konvergensi IFRS Terhadap Manajemen Laba

IFRS (*International Financial Reporting Standards*) yang menekankan pada *principle-based* menuntut pihak manajemen untuk memberikan estimasi dan *judgement* yang logis atau laporan keuangan. IFRS juga menuntut adanya pengungkapan (*disclosure*) yang lebih lengkap atas laporan keuangan dengan



menggunakan pendekatan *fair value* baik informasi akuntansi yang sifatnya kualitatif maupun kuantitatif. Pengungkapan dalam laporan keuangan harus sejalan dengan data atau informasi yang dipakai untuk pengambilan keputusan yang digunakan oleh manajemen (Wijanarko dan Tjahjono, 2016). Dengan adanya konvergensi IFRS sebagai standar global akan berdampak pada semakin sedikitnya pilihan-pilihan metode akuntansi yang dapat diterapkan sehingga akan meminimalisir praktik kecurangan akuntansi.

Penelitian yang dilakukan oleh Qomariah dan Marsono (2013) menganalisis pengaruh konvergensi IFRS terhadap manajemen laba. Penelitian tersebut menunjukkan penerapan IFRS pada perusahaan akan menurunkan tindakan manajemen laba karena terdapat pembatasan pertimbangan kebijakan manajemen yaitu kebijakan dalam pemilihan metode akuntansi yang semakin sedikit. Dengan demikian dalam penelitian ini, akan diuji hubungan antara konvergensi IFRS terhadap manajemen laba pada beberapa perusahaan di Indonesia.

2. Konvergensi IFRS Terhadap Manajemen Laba dengan Proporsi Dewan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderasi

KNKG (2006) menjelaskan bahwa komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Komisaris independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara IFRS menekankan pada *principle-based* yang menuntut pihak manajemen untuk memberikan estimasi dan *judgement* yang logis atau laporan keuangan, serta menuntut adanya pengungkapan (*disclosure*) yang lebih lengkap atas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



laporan keuangan dengan menggunakan pendekatan *fair value* pada informasi akuntansi. Sejumlah tuntutan dari IFRS tersebut membuat manajemen kesulitan untuk berperilaku oportunis dalam melakukan praktik manajemen laba.

Oleh karena itu, dengan diadopsinya IFRS, keberadaan dewan komisaris independen dimungkinkan akan memberikan pengaruh terhadap pengendalian dan pengawasan aktivitas pengelola perusahaan termasuk perilaku oportunistik seperti manajemen laba. Penelitian Prastiti dan Meiranto (2013) mengungkapkan bahwa semakin banyak jumlah komisaris independen dalam perusahaan, maka tindakan pengawasan semakin meningkat dan dapat mengurangi manajemen laba yang terjadi.

3. Konvergensi IFRS Terhadap Manajemen Laba dengan Jumlah Rapat Dewan Komisaris sebagai Variabel Moderasi

Penelitian Xie *et al.* (2003) menyatakan bahwa semakin sering dewan komisaris bertemu atau mengadakan rapat, maka akrual kelolaan perusahaan semakin kecil. Hal ini berarti semakin sering dewan komisaris mengadakan rapat, maka fungsi terhadap manajemen semakin efektif, sehingga dimungkinkan mengurangi praktik tindak manajemen laba. Dengan demikian, dengan diadopsinya IFRS sebagai standar akuntansi yang menuntut adanya transparansi di segala bidang, maka dimungkinkan jumlah rapat dewan komisaris dapat mempengaruhi konvergensi IFRS terhadap manajemen laba.

4. Konvergensi IFRS Terhadap Manajemen Laba dengan Proporsi Komite Audit Independen sebagai Variabel Moderasi

Tugas komite audit membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa: (i) laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang



berlaku umum, (ii) struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, (iii) pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan (iv) tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen (KNKG, 2006). Menurut hasil penelitian Prastiti dan Meiranto (2013) menyatakan bahwa independensi komite audit berhubungan negatif dengan manajemen laba. Oleh karena itu, dengan diterapkannya standar akuntansi berbasis IFRS, dimana standar yang mengedepankan transparansi dalam segala bidang, proporsi independensi komite audit yang semakin tinggi dapat mengurangi tindak manajemen laba.

5. **Konvergensi IFRS Terhadap Manajemen Laba dengan Proporsi Komite Audit yang Memiliki Keahlian Akuntansi atau Keuangan sebagai Variabel Moderasi**

Menurut Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: Kep-643/BL/2012 dalam peraturan nomor IX.1.5 menjelaskan bahwa persyaratan keanggotaan komite audit wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan. Penelitian Xie *et al.* (2003) menyatakan bahwa anggota komite audit yang merupakan komisaris independen yang ahli di bidang keuangan merupakan pihak yang efektif untuk mengurangi manajemen laba. Demikian diharapkan, dengan diadopsinya IFRS, semakin banyak anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan dapat mengurangi praktik manajemen laba yang terjadi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



6. Konvergensi IFRS Terhadap Manajemen Laba dengan Kualitas Auditor

sebagai Variabel Moderasi

Becker *et al.* (1998), menyatakan bahwa klien dari auditor *Non Big 6* melaporkan *discretionary accrual* yang lebih tinggi dari yang dilaporkan oleh klien auditor *Big 6*. Dapat disimpulkan bahwa klien dari auditor *Non Big 6* cenderung lebih tinggi dalam melakukan *earnings management*. Karena pada saat penelitian ini KAP *Big 6* telah berubah menjadi *Big 4*, maka diduga bahwa klien dari KAP *Non Big 4* cenderung lebih tinggi dalam melakukan *earnings management* dibandingkan dengan klien dari KAP *Big 4*. Oleh karena itu, auditor yang bekerja di KAP *Big 4* dianggap lebih berkualitas karena auditor tersebut dibekali oleh serangkaian pelatihan dan prosedur serta memiliki program audit dianggap lebih akurat dan efektif dibandingkan dengan auditor dari KAP *Non Big 4* (Effendi dan Daljono, 2013). Dengan demikian, IFRS yang menuntut adanya transparansi dalam segala bidang yang diduga dapat mengurangi terjadinya praktik manajemen laba dengan diperkuat oleh kualitas auditor yang tinggi.

Penelitian ini secara keseluruhan mengambil dari variabel-variabel yang telah di teliti sebelumnya. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajemen laba. Berikut kerangka pemikiran mengenai hubungan antar variabel penelitian:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

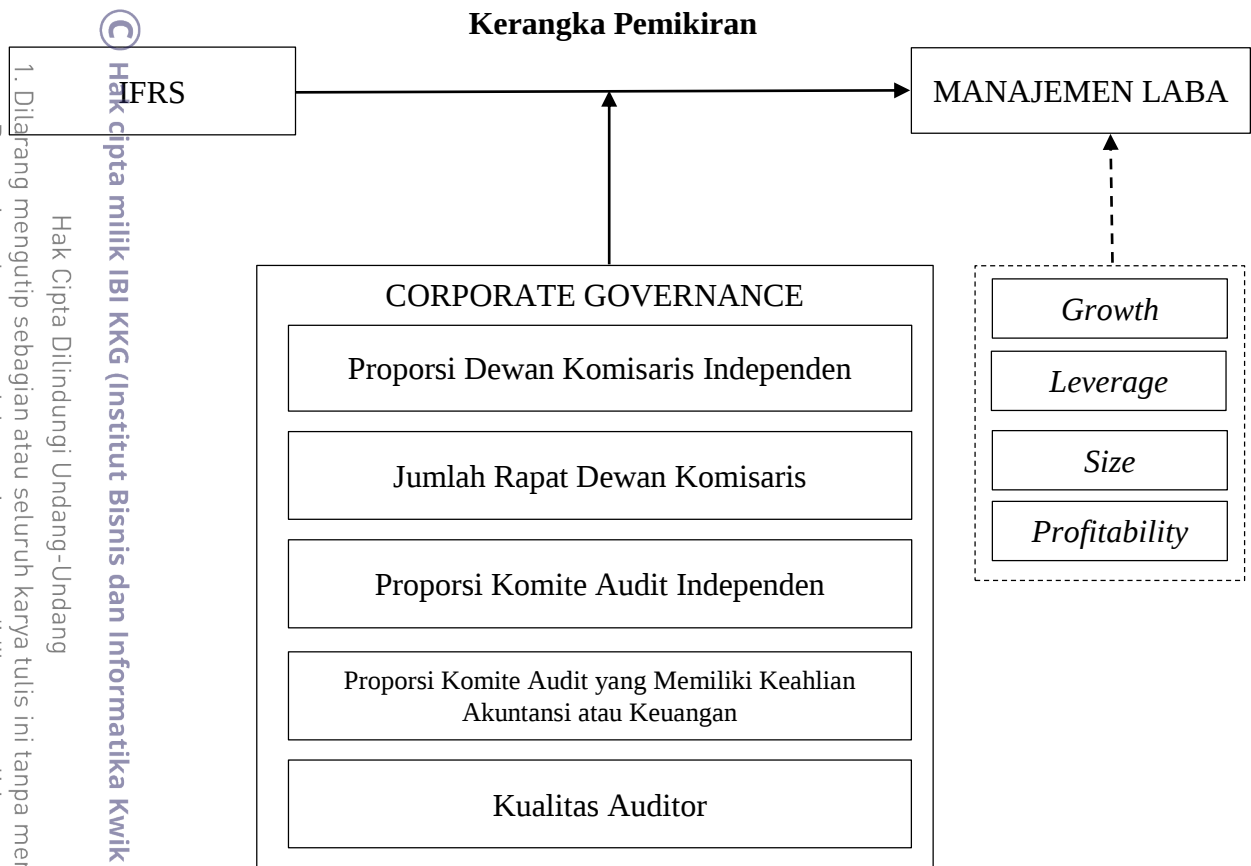
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

7. Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran di atas, maka peneliti dapat membuat hipotesis penelitian sebagai berikut:

Ha₁ : Konvergensi IFRS berpengaruh negatif terhadap Manajemen Laba

Ha₂ : Proporsi Dewan Komisaris Independen memperkuat Konvergensi IFRS terhadap Manajemen Laba

Ha₃ : Jumlah Rapat Dewan Komisaris memperkuat Konvergensi IFRS terhadap Manajemen Laba

Ha₄ : Proporsi Komite Audit Independen memperkuat Konvergensi IFRS terhadap Manajemen Laba



Ha₅ : Proporsi Komite Audit yang Memiliki Keahlian Akuntansi atau Keuangan memperkuat Konvergensi IFRS terhadap Manajemen Laba



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Ha₆ : Kualitas Auditor memperkuat Konvergensi IFRS terhadap Manajemen Laba

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.